

TUGAS AKHIR
URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN MPR DALAM
PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Oleh :
Deny Noer Wahid
202010110311027



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

TUGAS AKHIR
URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN MPR DALAM
PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Bidang Hukum

Oleh :
Deny Noer Wahid
202010110311027



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

DENY NOER WAHID

202010110311027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Cholidah, SH., MH



**URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN DALAM PENETAPAN
GARIS BESAR HALUAN NEGARA**

Diajukan Oleh:

DENY NOER WAHID

202010110311027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Isdian Anggraeny, SH., MKn



Dekan,


Prof. Dr. Tongan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DENY NOER WAHID

NIM : 202010110311027

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN DALAM PENETAPAN
GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makang, 18 Januari 2024



Deny Noer Wahid



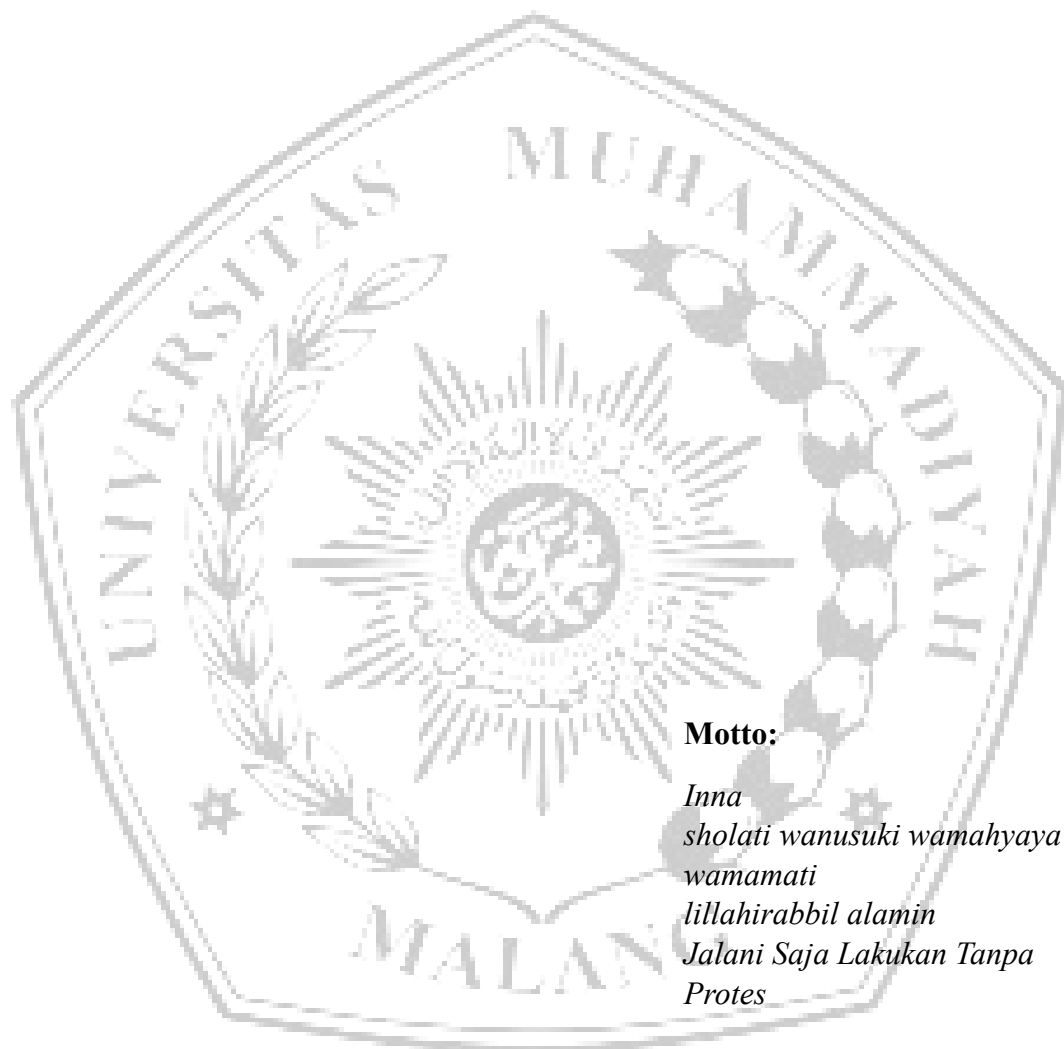
Ungkapan Pribadi :

Tiada Kata Yang Lebih Mulia dan Muria

Kecuali Kata Terima Kasih Kepada Orang Tua

Sejatinya Yang Menemani Perjuangan Seorang Anak

Hanyalah Dari Doa Ayahanda dan Ibunda



ABSTRAKSI

Nama : Deny Noer Wahid

NIM : 202010110311027

**Judul : URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN MPR
DALAM PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA**

Pembimbing : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak menentu dan cenderung kacau setelah MPR RI menghapuskan kekuasaan untuk menentukan haluan negara dan hanya memprioritaskan pada program politik lima tahunan. Dengan melakukan pembatasan terhadap penyusunan ketetapan tersebut, mengembalikan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil keputusan, diharapkan dapat menjadi fungsi kontrol sosial Warga Negara. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Urgensi pengembalian peran MPR untuk mengambil keputusan sebagai fungsi kontrol sosial warga negara. 2. Mengembalikan kewenangan MPR untuk membuat garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman pembangunan negara. Adapun terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *sosio-legal*. pengembalian peranan dan fungsi MPR sebagai pembentuk GBHN dengan berfokus pada strategi taktis bagaimana mewujudkan visi (misi) tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan sesuai dengan negara hukum yang demokratis dengan konsep negara kesejahteraan. Meskipun pada nantinya nanti akan mengembalikan peranan MPR melalui amandemen konstitusi negara, pemangku kebijakan nanti juga wajib memperhatikan jangan sampai dalam amandemen tersebut justru membuat MPR menjadi lembaga yang lebih super power dan menjadi lembaga yang sangat tidak bisa di kontrol sehingga akan berimbas pada kekacauan negara.

**Kata kunci: Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Garis-garis Besar Haluan Negara; Negara Kesejahteraan**

ABSTRACT

Nama : Deny Noer Wahid

NIM : 202010110311027

Judul : THE URGENCY OF RETURNING THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY AUTHORITY IN DETERMINING THE OUTLINES OF THE NATION'S DIRECTION

Pembimbing : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The development carried out by the government became erratic and tended to be chaotic after the MPR RI abolished the power to determine the direction of the state and only prioritized the five-year political program. By limiting the preparation of the decree, restoring the power of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia in making decisions, it is hoped that it can become a function of social control for citizens. Based on the description above, the following problems are formulated: 1. The urgency of returning the role of the MPR to make decisions as a social control function for citizens. 2. Restoring the MPR's authority to make the outlines of the state direction as a guideline for state development. As for the research methodology used by researchers is socio-legal research, restoring the role and function of the MPR as the shaper of the GBHN by focusing on tactical strategies on how to realize the vision (mission) in order to realize sustainable national development in accordance with a democratic rule of law with the concept of a welfare state. Although later on it will restore the role of the MPR through amendments to the state constitution, policy makers must also pay attention not to make the MPR a super-power institution and become an institution that cannot be controlled so that it will have an impact on state chaos.

Keywords: Role of People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia; Outlines of The Nation's Direction; Welfare State

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah hirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tetap tercurah-limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “***The Urgency Of Returning The People's Consultative Assembly Authority In Determining The Outlines Of The Nation's Direction*** atau **Urgensi Pengembalian Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara**” penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk pemenuhan terhadap syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. alhamdulillah pada proses penyusunan ini tentunya telah mengalami proses yang tidak mudah dengan banyaknya beberapa hambatan. Namun, dengan diiringi doa dan iktiar maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selesaiannya tugas akhir ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Terimakasih yang sangat saya ucapkan khusus di bagian ini kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Moh. Zaini dan Ibunda Ernawati yang tidak pernah lelah untuk selalu mensupport dan mendoakan saya sebagai penulis. Izinkan semoga tugas akhir ini paling tidak dapat memberikan raut bahagia dan tersenyumnyanya kedua orang tua saya, meskipun apapun yang penulis lakukan tidak akan pernah dapat membalas jasa orang tua penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan namun berkat bantuan banyak pihak termasuk dosen pembimbing, keterbatasan dan kekurangan tersebut dapat di minimalisir. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Moh. Zaini dan Ibunda Ernawati yang telah banyak memberikan doa, ridho dan dukungan serta pengorbanan baik yang berupa moral, materil ataupun imateril. Pun kedua orang tua penulis yang selalu menjadi semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah sangat

membantu penulis dalam hal reviewer jurnal dan membimbing hingga tembus scopus dan sinta 1 di jurnal Yuridika Unair;

5. Terima Kasih Kepada Bapak Said Noor Prasetyo,S.H.,M.H yang juga Wakil Dekan III yang selalu bertemu dan berdiskusi tentang Gagasan Program pada saat penulis menjabat sebagai Ketua BEM FH Periode 2022-2023;
6. Terima kasih kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini;
7. Terima kasih juga kepada keluarga besar saya, Bani Amin yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Terimakasih kepada Mas Roky,S.H dan istri yang telah selalu mensupport saya baik dalam diskusi dan motivator untuk menjadikan saya menyelesaikan tugas saya ini;
9. Terima kasih juga kepada seluruh saudara-saudara saya di Presidium Periode 2023/2024 Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang Komisariat Hukum yang telah menjadi teman dialektika yang membuat pikiran penulis selalu tajam yang pada akhirnya berakibat pada selesainya tugas akhir ini;
10. Terima kasih kepada Kandidat Doktor Muda Bang Febriansyah Ramadhan, S.H.,M.H yang telah membimbing penulis dan mengajarkan menulis dari tingkatan dasar hingga akhirnya penulis bisa menempuh tembok besar jurnal sinta 1 dan scopus;
11. Terima kasih selanjutnya saya haturkan kepada Pak A. Wahab Adhinegoro,S.H.,M.H, Bapak Wahyu Untung, S.H dan Pak Beni Ruston,S.H.,M.H beserta rekan yang tidak bisa saya sebutkan namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih di kantor Artono Wahab & Associates, Yayasan Bantuan Hukum Bima dan Law Office Ken Novia Wahab & Partners yang telah mengajarkan dan membimbing hal-hal praktik di dunia advokat hingga saat ini;
12. Terima kasih juga kepada teman hidup saya, Ayu Handayani, yang setia mendampingi dan memberikan suport luar biasa kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Terima kasih juga kepada Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang periode 2022-2023 yang dengan sudi mempersamai penulis dalam menjalankan roda organisasi lembaga intra serta menjadi rekan berpikir;
14. Terimakasih juga kepada mas Onky Facrur Rozie,S.E sebagai Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia sebagai motivator di aktivis mahasiswa;

15. Terima kasih juga kepada mas Riyan Ismawan Lawyer Kopi Jhony Jakarta yang juga menjadi rekan diskusi;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikannya menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis percaya dan yakin bahwa kebaikan dan pertolongan oleh seluruh Orang Tua, Dosen, serta saudara-saudara saya baik yang se-bangsa, se-agama dan se-ideologis insyaallah akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih besar dan tentunya jauh lebih baik. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Malang, 16 Januari 2024

Deny Noer Wahid



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
Ungkapan Pribadi :.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Kepenulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara.....	25
Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan dan Pemisahan Kekuasaan.....	31
Tinjauan Umum Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat	33
Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Negara.....	36
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	40
1. GBHN Sebagai Tugas Sentral Oleh MPR.....	40
2. Urgensi Mengaktifkan Kembali Peran MPR	47
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR LAMPIRAN	66
-----------------------	----



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Muarifal. "Lembaga-Lembaga Negara." *Ilmu Hukum*, no. 1 (2004): 1–13. https://www.researchgate.net/publication/336926262_Lembaga-lembaga_Negara.
- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. "Hukum Islam Antara Statis Dan Dinamis." *As-Syir'ah* 48, no. 2 (2014): 99–114.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Asmara, Galang. "Penguatan Kelembagaan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 357. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.115>.
- Asy'ari dkk, Syukri. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002) Buku III Lembaga Permusyawaratan Dan Perwakilan, Jilid 1*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.
- aznawi. "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. Mpr) Sebelum Dan Setelah Amandemen Uud 1945." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 (2021): 1–89.
- Crouch, Melissa A. "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391>.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.
- Daniel, Rizki. "COMPARISON OF URGENCY OF GBHN FOR NATIONAL DEVELOPMENT," no. December 2021 (2022).
- Deddy Supriady Bratakusumah. "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." Jakarta, 2003.
- Deny Noer Wahid dan Catur Wido Haruni. "Konstruksi Ideal Sistem Parlementary Threshold Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. (1) (2023).
- Dewi, Ni Wayan Merda Surya. "Kewenangan Mpr Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen Ke-4 Uud Nri 1945" 7, no. 1 (2017): 1–11.
- Fahlevi, Reja, and Darul Huda. "Kolaborasi Kabinet Zaken Dan Kabinet Koalisi Dalam Pembentukan Kabinet Efektif." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 02 (2020): 48–54. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14939>.
- Fradhana Putra D., Dedi Joansyah P., Sahril Wildani, Ana LaelaFatikhatul C., Alfiah Yustiningrum, Dinda Fefty M P. "View of Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 194–215. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3641/2513>.
- Huda, Ni'matul. "Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan*

- Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 1–18. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- JDHID. UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- . Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
- King, Blair Andrew. "Empowering the Presidency: Interest and Perception in Indonesia: Constitutional Reforms 1999-2002." The Ohio State University, 2004.
- Kusumadilaga, Rimba. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating." *Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro, 2010.
- M.D, Mahfud, Moh. Mahfud MD, Radita Ajie, Sunaryati Hartono, Budi Suhariyanto, Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur D A N Masif, et al. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Di Kota Tebing Tinggi 2017." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 100 (2009): 255. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3673>.
- Maiwan, Mohammad. "Wacana Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Langkah Mewujudkan Arsitektur Konstitusi Demokratik." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 12, no. 2 (2013): 68–83. <https://doi.org/10.21009/jimd.v12i2.6286>.
- Mardian Wibowo. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Mahfud M. D., 1957-. "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi," 2006, 311. https://books.google.com/books/about/Membangun_politik_hukum_menegakkan_konst.html?id=tWabAAAAMAAJ.
- "MPR RI." Accessed June 23, 2022. <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Selayang-Pandang>.
- Nazriyah, R. "Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 39. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.134>.
- Nugraha, Harry Setya. "MPR DAN URGENSI GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (June 2019): 191–217. <https://doi.org/10.25123/VEJ.V5I1.3293>.
- . "Rekonstruksi Kelembagaan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tesis Oleh : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum." Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Ocktavia, Nadia Ninna. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perbandingan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru Dan Reformasi.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.
- “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia / Oleh Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed June 23, 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=835974>.
- “Perihal Undang-Undang Di Indonesia | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Accessed June 23, 2022. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=2389>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Kencana*, 2017. Vol. 17, 2016. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.143>.
- . *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenada Media Group, 2017.
- Prayudi, P. “Mpr, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politikanya.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam ...*, 2016, 19–40. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/299>.
- Purba, Iman Pasu. “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 146–53. <https://doi.org/10.21831/CIVICS.V14I2.16050>.
- R. Nazriyah. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rafiqi, Ilham Dwi. “Criticism toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (2021): 144–60. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14991>.
- Rannie, Mahesa. “Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 98–117. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1040>.
- Rasyid., Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakt, 2006.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar 1945” 4, no. 1 (1945): 1–12.
- Riyadi, Eko. “Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2012): 207–22. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/1907/1381>.
- Santoso, Hari Agus. “Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi.” *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021): 254–72.
- Subkhan, Imam. “GBHN Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.” *Aspirasi* 5, no. 2 (2014): 131–44.
- Sudirta, I Wayan. “Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (December 2020): 258–78. <https://doi.org/10.35586/JYUR.V7I2.2252>.
- Susanto, Mei. “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensi Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 427. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17i2.427-445>.

- . “Wacana Menghidupkan Kembali GBHN Dalam Sistem Presidensial Indonesia (The Discourses Revive the DPSP in the Presidential System of Indonesia).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 427–45.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum Dan Globalisasi*. Genta Press. Bandung: Genta Press, 2011. ???
- Triyanta, Agus. “Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat Dan Kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 1–23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art1>.
- Ulya, Nurul Ula, Fazal Akmal Musyarri, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Redefinisi Makna, Kebebasan Berserikat, and A Pendahuluan. “Peranan Tap Mpr Yang Bersifat Mengatur Sebagai Bentuk Aerodinamika Hukum,” 2013, 1–13.
- Wahid, Deny Noer. “Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 1 (2023): 57–69. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.148>.
- Wahid, Deny Noer, Tasyabilla Pandi Utami, and Febriansyah Ramadhan. “Constitutionality Of President’s Authority Regarding Lockdown Policy During The State’s Emergency.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* Vol 4 No 1, no. No 1 (2022): 41–60.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives on Politics*. John Knox Press. Revised. Wensminste, 2000. <https://books.google.co.id/books?id=tBxIRTNjgeEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Yamin, Muhammad. *Konstituante Indonesia Dalam Gelanggang Demokrasi*. Jambatan, Jakarta, 1956.
- Yorisca, Yenny. “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan.” *Legislasi Indonesia*, 2016, 98–111.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DENY NOER WAHID

Nim : 20201010311027



Dengan Judul Skripsi : URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN
DALAM PE
DALAM PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN
BANGSA NEBORA

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18/1/24
Cholidah



Malang, 16 Januari 2024

Cholidah, SH., MH

